

TANTANGAN POLITIK EKONOMI INDONESIA 2026 DAN SKENARIO MITIGASI

Perkumpulan Amerta
Januari, 2026

PENGANTAR-1

Indonesia berada di persimpangan yang tenang namun menentukan.

Secara teori, negara ini memasuki masa bonus demografi—juta-an pemuda siap bekerja, berinovasi, dan mengangkat perekonomian. Namun, di sisi lain, berita utama menceritakan kisah yang lebih mengkhawatirkan: defisit anggaran melebar, utang publik meningkat, pajak tetap rendah dan tidak merata, ekspor melambat, lapangan kerja semakin sulit ditemukan, dan bantuan sosial terus diperluas hanya untuk mempertahankan kondisi sosial yang semakin sulit. Ini bukan kontradiksi—ini adalah peringatan.

Bagi negara-negara dengan kesenjangan sosial-ekonomi yang lebar seperti Indonesia, tren-tren ini saling terkait erat. Ketika penciptaan lapangan kerja tertinggal, bonus demografi berubah menjadi pengangguran. Ketika pajak tetap sempit, pemerintah meminjam. Ketika pinjaman menggantikan reformasi, program-program sosial menjadi lifeline—tetapi juga beban yang semakin berat. Seiring waktu, negara berisiko menghabiskan lebih banyak energi untuk mengelola kemiskinan dan ketidakpuasan daripada menciptakan peluang dan produktivitas.

PENGANTAR-2

Inilah mengapa perdebatan kebijakan saat ini tidak sekadar tentang anggaran, utang, atau kesejahteraan. Ini tentang pertanyaan yang jauh lebih besar: apakah Indonesia akan memanfaatkan bonus demografinya untuk membangun kelas menengah yang kuat dan produktif—atau akan menghabiskan bonus tersebut untuk menunda keputusan sulit? Jawabannya akan membentuk tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kohesi sosial, stabilitas politik, dan kualitas demokrasi di tahun-tahun mendatang.

Telaah ini mengajak masyarakat untuk melampaui solusi jangka pendek dan mempertanyakan jenis masa depan apa yang sedang dibiayai oleh Indonesia: masa depan yang didanai oleh kerja, keterampilan, dan kontribusi bersama—atau masa depan yang dipertahankan oleh utang, subsidi, dan penundaan. Memahami pilihan ini adalah langkah pertama menuju pengambilan keputusan bersama.

1. Kerentanan Fiskal Menjadi Struktural (Bukan Siklus)

Apa yang terjadi

- Rasio pajak yang rendah dan sistem pemungutan pajak yang lemah membatasi kemampuan negara untuk membiayai dirinya sendiri.
- Defisit anggaran semakin ditutupi oleh pinjaman.
- Pembayaran utang meningkat bahkan ketika pertumbuhan melambat.

Implikasi

- Kebijakan fiskal menjadi reaktif, bukan strategis.
- Porsi anggaran yang semakin besar dialokasikan untuk pembayaran bunga daripada: infrastruktur, pendidikan, pembaruan industri.
- Negara kehilangan kapasitas kontra-siklus selama resesi.

➡ Dalam masyarakat yang tidak setara, kerentanan ini secara tidak proporsional merugikan kelompok berpenghasilan rendah dan menengah yang bergantung pada layanan publik.

2. Pengeluaran Sosial: Stabilitas Sesaat, Kerentanan Menanti

Apa yang terjadi

- Program-program sosial besar digunakan untuk:
 - mengurangi dampak pengangguran,
 - mengelola ketidaksetaraan,
 - mencegah kerusakan.
- Namun, program-program ini sering kali dibiayai oleh utang, bukan dari peningkatan kapasitas pajak.

Implikasi

- Stabilitas sosial jangka pendek meningkat.
- Risiko jangka panjang meningkat:
 - ketergantungan pada bantuan sosial,
 - Fiskal yang sempit dan rigid (program-program sulit untuk direformasi),
 - politisasi subsidi.

➡ Pengeluaran sosial menjadi pengganti penciptaan lapangan kerja, bukan pelengkap.

3. Pelemahan Ekspor-Impor Melemahkan Mesin Pertumbuhan

Apa yang terjadi

- Penurunan permintaan global dan siklus komoditas mengurangi ekspor.
- Kompresi impor atau biaya yang lebih tinggi (tekanan mata uang) meningkatkan harga input.
- Pekerjaan di sektor manufaktur dan perdagangan terdampak awal, diikuti pihak-pihak di sepanjang rantai pasok.

Implikasi

- Pendapatan valuta asing yang lebih rendah → kerentanan mata uang.
- Jumlah industri, khususnya manufaktur yang berkurang → pemutusan hubungan kerja dan penundaan investasi.
- Basis pajak yang lebih sempit, hanya mengandalkan sektor-sektor terkait perdagangan yang juga sedang melemah.

➡ Ekonomi beralih ke dalam tanpa produktivitas domestik yang cukup untuk mengkompensasi kegiatan ekspor-impor.

4. Pengangguran Mengubah Bonus Demografis Menjadi Beban

Apa yang terjadi

- Populasi usia kerja yang besar memasuki pasar tenaga kerja.
- Penciptaan lapangan kerja tidak mampu mengikuti laju pertumbuhan, terutama di sektor formal.
- Sektor informal menyerap tenaga kerja tetapi menghasilkan produktivitas rendah dan pajak rendah.

Implikasi

- Peningkatan pengangguran dan setengah pengangguran di kalangan pemuda.
- Perkembangan sektor informal mengikis:
 - basis pajak,
 - cakupan perlindungan sosial,
 - pengembangan keterampilan tinggi.
- Mobilitas sosial terhenti.

➡ Bonus demografi berubah menjadi tekanan demografi yang berbahaya, menjadi bom waktu ekonomi, sosial, dan politik.

5. Perangkat Ketidaksetaraan dan Tekanan Ekonomi Politik

Apa yang terjadi

- Kelompok elit dan berpenghasilan tinggi mendapat pajak yang rendah melalui berbagai mekanisme dan alasan (legal maupun ilegal).
- Kelompok menengah menanggung pajak konsumsi dan inflasi.
- Kelompok miskin bergantung pada transfer ke daerah dan program sosial daripada peluang usaha dan pekerjaan.

→ Negara mengelola ketidaksetaraan sosial-ekonomi secara politik, bukan melakukan perbaikan struktural dan sistemik.

Implikasi

- Ketidaksetaraan tetap ada meskipun pengeluaran sosial tinggi.
- Kepercayaan publik menurun: “Utang dan beban hidup meningkat, tetapi kehidupan tidak membaik.”
- Debat kebijakan beralih dari reformasi ke konflik distribusi.

6. Risiko Makroekonomi dan Keuangan

Tekanan gabungan

Utang + perlambatan perdagangan +
pengangguran menyebabkan:

- tekanan nilai tukar,
- biaya pinjaman yang lebih tinggi,
- kerentanan terhadap guncangan eksternal.

Implikasi

- Penurunan kepercayaan investor.
- Jangka waktu utang yang lebih pendek dan risiko refinancing yang lebih tinggi.
- Potensi pengetatan fiskal paksa dalam resesi.

➡ Potensi krisis menjadi lebih besar, sekaligus lebih mahal secara sosial jika terjadi.

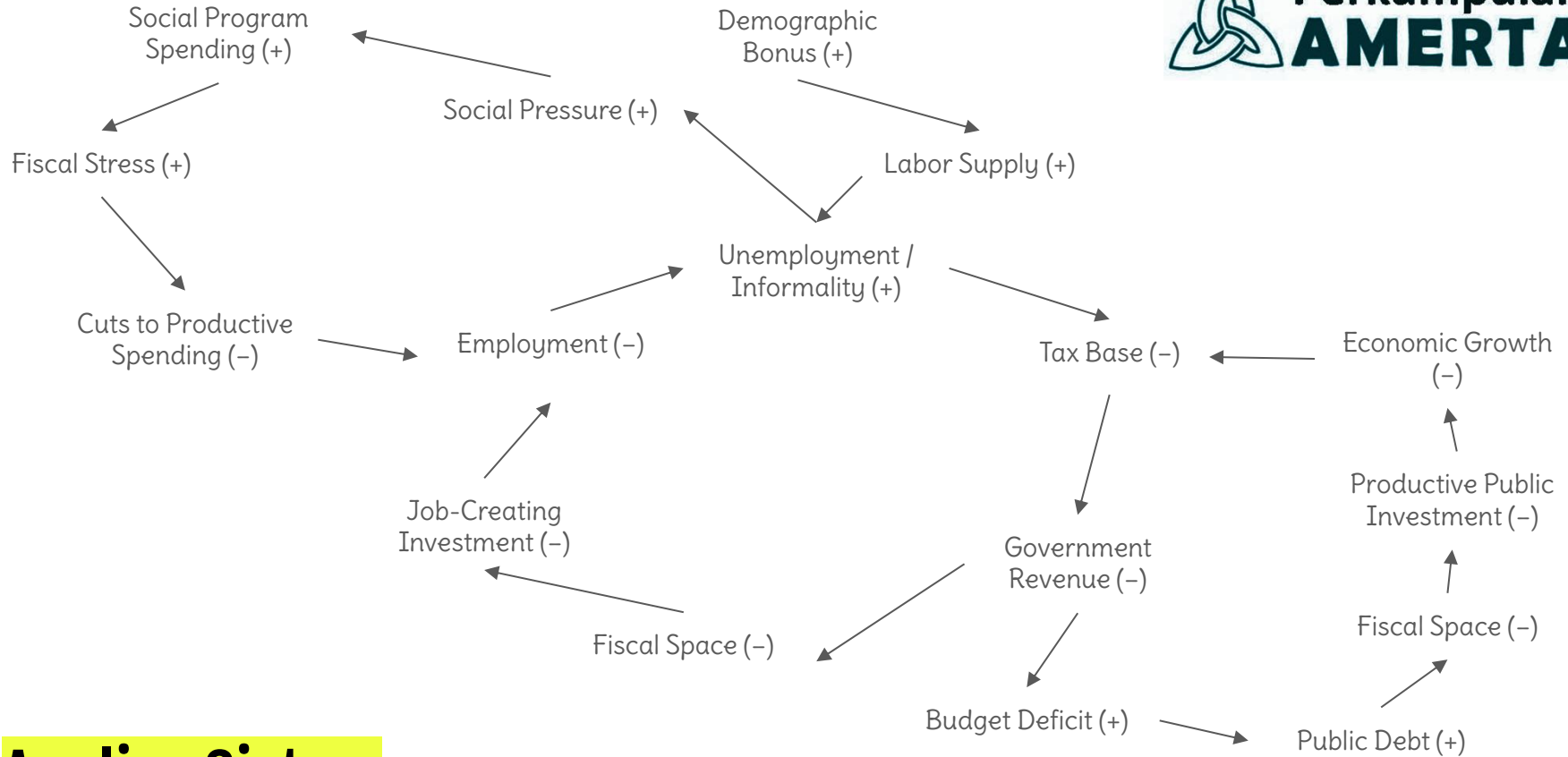
Catatan Terhadap Kondisi Saat Ini

Jika tidak dikelola:

- ⚠ Tekanan fiskal kronis
- ⚠ Ketidaksetaraan yang mengakar
- ⚠ Frustrasi pemuda
- ⚠ Ketidakstabilan kebijakan

Jika dikelola secara strategis:

- Pengeluaran sosial dapat membangun modal manusia.
- Bonus demografis dapat memperluas basis pajak.
- Penurunan perdagangan dapat diimbangi oleh produktivitas domestik.



Analisa Sistem

Pilihan Strategis yang Dihadapi Indonesia

Pada tingkat sistem, Indonesia dihadapkan pada tiga skenario kebijakan yang mungkin. Setiap skenario membawa konsekuensi politik dan ekonomi yang berbeda pula.

Scenario	Dominant Logic	Political Style
1. Structural Reform Path	Break reinforcing traps, strengthen virtuous loops	Transformational, high-coordination
2. Managed Populism Path	Buy time, delay reform	Transactional, risk-averse
3. Drift / Crisis Path	No clear strategy	Fragmented, reactive

SKENARIO 1 — JALUR REFORMASI STRUKTURAL (Keuntungan Tinggi, Perlawanan Tinggi)

Tujuan Utama: Mengubah bonus demografis → pekerjaan formal → basis pajak → keberlanjutan fiskal.

Kebijakan Utama

- Reformasi pajak progresif (kekayaan, properti, keuntungan modal)
- Penegakan pajak yang kuat & kepatuhan digital
- Penyesuaian pengeluaran sosial menuju: keterampilan, kesehatan, program yang terkait dengan pekerjaan
- Kebijakan industri berorientasi pekerjaan & formalisasi UMKM
- Sederhanisasi regulasi dengan disiplin penegakan

Gain	Cost / Risk
Long-term fiscal stability	Short-term political backlash
Broader tax base	Elite resistance & capital flight risk
Better-quality jobs	Slower initial growth
Reduced inequality	Higher administrative burden
Stronger institutions	Requires coalition discipline

SKENARIO 2 — JALUR POPULISME TERKENDALI (Stabilitas Jangka Pendek, Risiko Jangka Menengah)

Tujuan Utama: Menjaga stabilitas sosial dan dukungan politik tanpa menghadapi ketidaksetaraan struktural.

Kebijakan Utama:

- Penerapan program bantuan sosial dan subsidi
- Pengeluaran yang didanai utang
- Dukungan industri secara selektif (seringkali dipilih secara politis)
- Penghindaran atau pelemahan reformasi pajak
- Toleransi terhadap informalitas dan beberapa bentuk dan skala ekonomi ilegal

Gain	Cost / Risk
Political popularity	Rising debt dependency
Short-term poverty relief	Weak job creation
Avoids elite conflict	Persistent inequality
Fast policy wins	Long-term fiscal fragility
Social calm	Youth frustration builds

SKENARIO 3 — DRIFT / JALUR KRISIS (Upaya Terendah, Risiko Tertinggi)

Tujuan Utama: Tidak ada tujuan yang jelas—kebijakan merespons guncangan.

Ciri-ciri

- Anggaran *incremental* dengan defisit yang meningkat
- Program sosial yang terfragmentasi
- Penegakan peraturan yang lemah
- Pengangguran dan informalitas yang meningkat
- Volatilitas kebijakan, tergantung guncangan ekonomi, sosial, politik, atau global

Short-Term Comfort	Long-Term Damage
Avoids hard decisions	Loss of policy credibility
Keeps coalitions intact	Fiscal crisis risk
No reform backlash	Forced austerity later
Political survival	Democratic fatigue

Karakteristik Kebijakan Ketiga Skenario

<i>Policy Area</i>	<i>Reform Path</i>	<i>Populist Path</i>	<i>Drift</i>
<i>Tax</i>	<i>Broad & progressive</i>	<i>Avoided</i>	<i>Eroding</i>
<i>Debt</i>	<i>Transitional</i>	<i>Structural</i>	<i>Explosive</i>
<i>Jobs</i>	<i>Formal & productive</i>	<i>Informal absorption</i>	<i>Insufficient</i>
<i>Inequality</i>	<i>Reduced</i>	<i>Managed</i>	<i>Worsening</i>
<i>Democracy</i>	<i>Institutional</i>	<i>Transactional</i>	<i>Fragile</i>

“Indonesia harus memilih apakah akan mencapai masa depan dengan kerja dan produktivitas beserta segala risikonya saat ini—atau dengan utang dan penundaan masalah.”

PENUTUP -1

Pesannya jelas dan semakin mendesak. Bagi negara seperti Indonesia, ketidakpastian global, kerentanan fiskal, kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin melebar, dan bonus demografis yang besar bukanlah tantangan terpisah. Mereka adalah kekuatan yang saling berkonvergensi. Jika dibiarkan tanpa pengelolaan, mereka dapat dengan cepat saling terkait menjadi bencana sistemik—di mana utang yang meningkat bertemu dengan ruang fiskal yang menyempit, pengangguran bertemu dengan frustrasi sosial, dan potensi demografis berubah menjadi ketidakstabilan politik dan ekonomi.

Skenario pertama—jalur reformasi struktural—bukanlah pilihan yang mudah. Skenario ini membutuhkan kerja keras, keberanian politik, disiplin sosial, pengambil kebijakan yang bijak dan berani, serta birokrat yang kompeten dan netral. Indonesia harus menghadapi kenyataan yang tidak nyaman: mereformasi sistem perpajakan yang selama ini dihindari, mengalihkan pengeluaran sosial dari konsumsi ke peningkatan kapasitas, menegakkan aturan secara konsisten, mengatasi ekonomi biaya tinggi dan inefisiensi karena KKN, dan berinvestasi secara sabar dalam lapangan kerja, keterampilan, dan produktivitas. Langkah-langkah ini tidak akan langsung mendapat apresiasi. Dalam jangka pendek, bahkan mungkin memicu resistensi dan ketidaknyamanan.

PENUTUP -2

Namun, jalur alternatif jauh lebih berbahaya. Menunda reformasi demi populisme jangka pendek atau kebijakan yang tidak terarah mungkin mempertahankan stabilitas permukaan, namun secara bertahap mengikis fondasi negara. Dalam kondisi volatilitas global — perlambatan perdagangan, pengetatan keuangan, dan guncangan geopolitik — negara-negara dengan basis pajak yang lemah, utang tinggi, dan populasi muda yang besar namun tidak bekerja hanya memiliki margin kesalahan yang sangat kecil. Ketika krisis datang, ia tidak bertanya apakah reformasi secara politik nyaman; ia hanya mengungkapkan apa yang ditunda.

Bonus demografis Indonesia adalah kesempatan sekali seumur hidup, bukan kondisi permanen. Jika diserap ke dalam lapangan kerja produktif dan sistem pajak yang adil, hal itu dapat memperkuat keuangan publik, mengurangi ketimpangan, dan menjamin stabilitas jangka panjang. Jika diserap ke dalam pengangguran, informalitas, dan pengeluaran sosial yang didanai utang, hal itu akan memperburuk tekanan fiskal dan ketegangan sosial tepat ketika kondisi global paling tidak bersahabat.

Pilihan bagi Indonesia, oleh karena itu, bukanlah antara perubahan mendasar atau ketenangan dan kenyamanan semu. Pilihan itu adalah antara melakukan perubahan sekarang secara mendasar dan konsisten, atau menunda perubahan hingga krisis melanda. Bertindak lebih awal memungkinkan Indonesia untuk membentuk masa depannya secara terencana. Menunda tindakan berisiko membuat masa depan Indonesia dibentuk oleh kekuatan diluar kendalinya.

Terima Kasih

Perkumpulan Amerta

info@amerta.or.id

www.amerta.or.id

